

**IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN
PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak) Pada Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

HISBULLAH
NIM.10800113186

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hisbullah

NIM : 10800113186

Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 28 Juni 1994

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : BTN Paccinongan Harapan

Judul : “Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (Studi Kasus Pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, September 2017

Penyusun,

Hisbullah

10800113186



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa . ■ 424835, Fax424836


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara HISBULLAH: 10800113186, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **“Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan”, (Studi Kasus BAPPEDA Kabupaten Gowa)**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian **MUNAQASYAH**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 2017

Pembimbing I


Memen Suwandi., SE., M. Si
NIP. 19720228 200912 1 003

Pembimbing II


Dr. Amiruddin K., M. EI
NIP. 19640908 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan, (Studi Kasus Pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)” yang disusun oleh **Hisbullah**, NIM: 10800113186, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Rabu 23 Agustus 2017 M bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi, dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 6 Dzulhijjah 1438 H
Rabu, 28 Agustus 2017 M

DEWAN PENGUJI

Ketua Majelis	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Memen Suwandi, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Amiruddin K., M.El.	(.....)
Munaqisy I	: Andi Wawo, SE., Ak.	(.....)
Munaqisy II	: Ismawati, SE., M.Si.	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NIP: 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (Studi Kasus pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)” dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang diharapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun untuk memberikan sumbangsi terhadap pengembangan penelitian, khususnya bidang akuntansi sektor publik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya. Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan, tidak terkecuali Keluarga tercinta, terutama kedua orang tuaku, Bapak Madeali dan Ibu Bale serta saudara-saudaraku, terutama kak Jabbar, S.,Pd, Kak Halisa, S.,Pd, dan kak Amiruddin, SH, atas segala curahan doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis sampai pada titik ini, serta konstribusi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Madjid., SE., M. Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Memen Suwandi., SE., M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih atas pembelajaran dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Memen Suwandi., SE., M. Si. dan Bapak Dr. Amiruddin K., M. EI. selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi penulis selama ini mulai dari semester 1 hingga selesainya penulis dalam menempuh studi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penulis dalam menimbah ilmu dan memperluas wawasan selama penulis mengikuti pendidikan di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
7. Segenap Staf Jurusan dan Pegawai Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi.

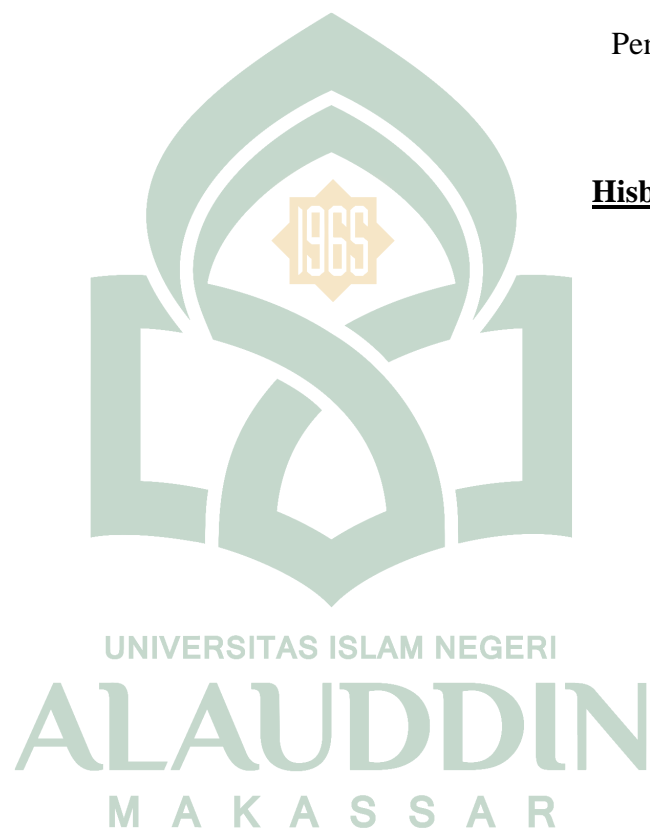
8. Seluruh pegawai pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa. Terima kasih telah memberikan data, informasi, dan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian lapangan.
9. Bapak Dr. M. Rusdi Thahir, M. Ag, dan ibu Dra. Hj. Suharti, M. Pd, dan kakak Sitti Yudiarti Fajriah Rusdi, S. Pd, selaku orang tua dan keluarga baru saya selama ini terima kasih atas bimbingan dan dorongan serta motivasi sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
10. Rahmadani Ramli Amd. Keb. Terima kasih sudah setia menemani penuh kesabaran meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan dorongan atau motivasi serta dukungan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman dari jurusan akuntansi terutama angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda tawanya, keakraban, persaudaraan, dukungan serta motivasi dan pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
12. Teman-teman dan sahabat-sahabat angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi, keakraban dan persaudaraannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
13. Teman-teman dan sahabat-sahabat dari Community Arung Bunne, LSB Saoraja Sinjai dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (HIPPMAS) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi, keakraban, persaudaraan dan pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Wassalam.

Samata-Gowa, September 2017

Penulis

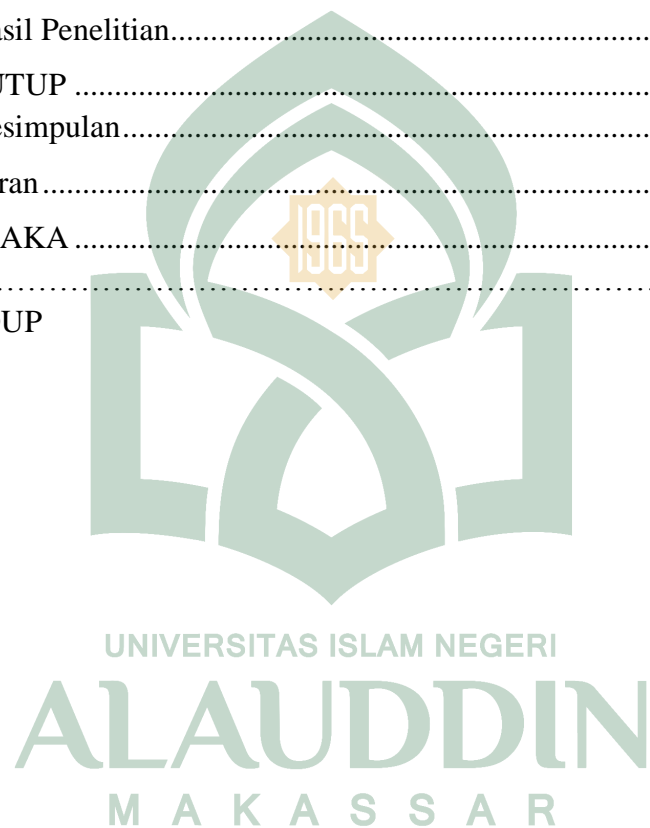
Hisbullah



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	14-44
A. Teori Stewardship.....	14
B. Teori Keagenan.....	15
C. Teori Stakeholder.....	20
D. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	23
E. Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan	28
F. Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan	33
G. Kualitas pelaporan keuangan pemerintahan.....	35
H. Rerangka Konseptual.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43

B.	Pendekatan Penelitian	44
C.	Sumber Data Penelitian.....	44
D.	Metode Pengumpulan Data.....	45
E.	Instrumen Penelitian	45
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48-82
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
B.	Hasil Penelitian.....	55
BAB V	PENUTUP	83-85
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89
RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rerangka Konseptual	42
Gambar 1.2 Struktur Organisasi.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	11
Tabel 1.2 Rekapitulasi Analisis Beban Kerja (ABk).....	53
Tabel 1.3 Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas Menuju Akrua dan Basis Akrua.....	62
Tabel 1.4 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 Dan 2016	67
Tabel 1.5 Rincian Beban Operasi Tahun 2015 dan 2014.....	68
Tabel 1.6 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2015	69
Tabel 1.7 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2016	75



ABSTRAK

NAMA : HISBULLAH

NIM : 10800113186

JUDUL : *IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN PEMERINTAHAN* (Studi Kasus Pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Kabupaten Gowa, Bagaimana optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Kabupaten Gowa. Manfaat penelitian yaitu manfaat teori dan manfaat praktik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Fenomenologi*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan dikantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa BAPPEDA Kabupaten Gowa telah antusias mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem tersebut.

Kata kunci: *Implementasi, Optimalisasi, Sistem Akuntansi, Akrual Basis, Kualitas Pelaporan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, PPNo 71 tahun 2010 mengamanatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh harus di terapkan pada tahun anggaran 2015.¹ Pada tahun 2015 adalah tahun yang sangat krusial dalam bidang pelaporan keuangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tidak terkecuali pada seluruh pemerintah sulawesi selatan. Hal tersebut adalah karena pada tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi pada pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah sulawesi selatan, dari yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual (*akrual basis*), dan kemudian Permendagri No 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.²

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana amanat dari undang-undang nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, bahwa setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat harus menerapkan basis akrual untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, mau tak mau

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual”.

²Republik Indonesia, “Permendagri No 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017”.

semua pengelolaan keuangan pada satuan kerja pemerintah pusat harus mampu daerah untuk menerapkan basis akrual. Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Gowa harus melakukan peningkatan kualitas profesionalisme Aparatur pengelola keuangan agar mampu beradaptasi dan menjalankan dengan perubahan tersebut, mampu menjalankan tugas secara professional, memegang teguh etika birokrasi dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka memberikan informasi yang benar, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat Kabupaten Gowa.

Akhir-akhir ini, organisasi sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan efisien. Lemahnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governace*) diistansi pemerintahan ditandai dengan tidak efektifnya organisasi dan birokrasi, rendahnya kualitas pelayanan terhadap publik, sulitnya pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.³ Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012) bahwa *Good Governance* pada sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan

³Sulaeman, Abdul Hamid, Mukhlis Yunus. “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pegawai Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bireuen”, Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No 4 Tahun 2015, hal. 112-121.

pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Gowa (BAPPEDA) terus melakukan pengevaluasian terhadap sumber daya dalam pemerintahannya agar lebih efektif dan efisien dalam pelaporannya.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC Public Sector Committee dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.⁴ Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber

⁴IFAC Public Sector Committee “Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, Tahun 2014.

daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Impelentasi dan optimalisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BAPPEDA harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi agar menghasilkan laporan yang akurat dan terpercaya. Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi, Hasibuan dalam (Pristiani2015). Sedangkan menurut Robbins dalam (Pristiani 2015) kinerja sebagai fungsi hasil interaksi antara kemampuan dan motivasi. Jadi kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya dan tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai jika kinerja karyawannya baik.⁵

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama SDM Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual di BAPPEDA Kabupaten Gowa. Seorang PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang ditandai dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

⁵Pristiani. “Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrual Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Jabatan”, Jurnal Universitas Negeri Semarang. Vol.3 No. 1 Tahun 2015, hal. 1-10.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN, mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang lebih populer dengan istilah "*Good Governance*".⁶

Salah satu masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang besar apa bila dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Persoalan yang ada adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan dapat tercapai.⁷ Sehubungan pendapat yang dikemukakan oleh (Sujana, dkk 2015) bahwa Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serta pengkajian yang lebih mendalam, karena bagaimanapun juga manusia yang akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sedangkan pendapat dari Hafid (2016) yang menyatakan bahwa tingkat efisien yang tinggi ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu SDM yang professional yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru.

⁶Pristiani, "*Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrua Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Jabatan*", Jurnal Universitas Negeri Semarang. Vol. 3 No. 1 Tahun 2015, hal. 1.

⁷Noviyanti, Mimin Aminah. "*Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Dan Pengalaman Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Vol. 3 No. 1 Tahun 2015, hal. 21-41.

Jika badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa ingin memiliki SDM yang professional dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, organisasi pemerintahan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan bagi SDM-nya. Menurut Siagian dalam Apriani (2015): beberapa alasan utama perlunya pengembangan SDM, yakni: 1) adanya pegawai baru yang tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugasnya; 2) pengetahuan pegawai yang perlu pemuktakhiran; 3) perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga karena pergeseran nilai-nilai sosial budaya; dan 4) kemungkinan perpindahan pegawai. Hanya saja untuk menghasilkan prestasi kerja yang tinggi seorang karyawan tidak saja perlu memiliki keterampilan, tetapi ia juga memiliki keinginan dan semangat untuk berprestasi tinggi.⁸ Maka upaya-upaya organisasi dalam mendorong pegawainya untuk bekerja lebih baik harus terus dilakukan termasuk di BAPPEDA Kabupaten Gowa, dengan adanya pegawai yang bekerja secara baik ini, maka di harapkan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Sepengetahuan peneliti masih sedikit penelitian tentang implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan”**.

⁸Apriani, Tini. “Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Kabupaten Serang”, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 4 Tahun 2015, hal. 289 – 300.

B. Rumusan Masalah

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana amanat dari undang-undang nomor 71 tahun 2010 tentang keuangan negara, bahwa setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat harus menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Maka dari itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa harus menerapkan sistem tersebut, oleh karena itu dari penjelasan dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik itu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam memahami seberapa besar implementasi dan optimalisas

sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan di Indonesia secara umum dan di Provinsi Sulawesi Selatan (BAPPEDA Kabupaten Gowa) secara khusus. penelitian ini diharapkan dapat memberikan penegasan atau dukungan terhadap *teori stewardship, agency Theory, stakeholder*.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan menambah wawasan mengenai implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa.

Bagi pemerintahan daerah dalam lingkup BAPPEDA Kabupaten Gowa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi pegawai untuk lebih mengoptimalkan peranannya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual, diantaranya dilakukan Margareta 2015, yang meneliti tentang Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap dalam penerapan SAP akrual, hal tersebut telah dibuktikan dengan para staf bagian

keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan. Bentuk persiapannya yaitu dengan mengikuti bimbingan teknis (Bintek) atau pelatihan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), dan mengikuti berbagai *workshop* mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ranilhaj 2016, yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Unit Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kppn Kota Bogor. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui variabel kualitas teknologi informasi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Variabel tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, dan latar belakang pimpinan tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kusuma 2013, yang meneliti Tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah masih sangat rendah. Secara khusus tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Begitu pula penelitian yang diteliti oleh Lamonisi 2016, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Pada Pemerintah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.

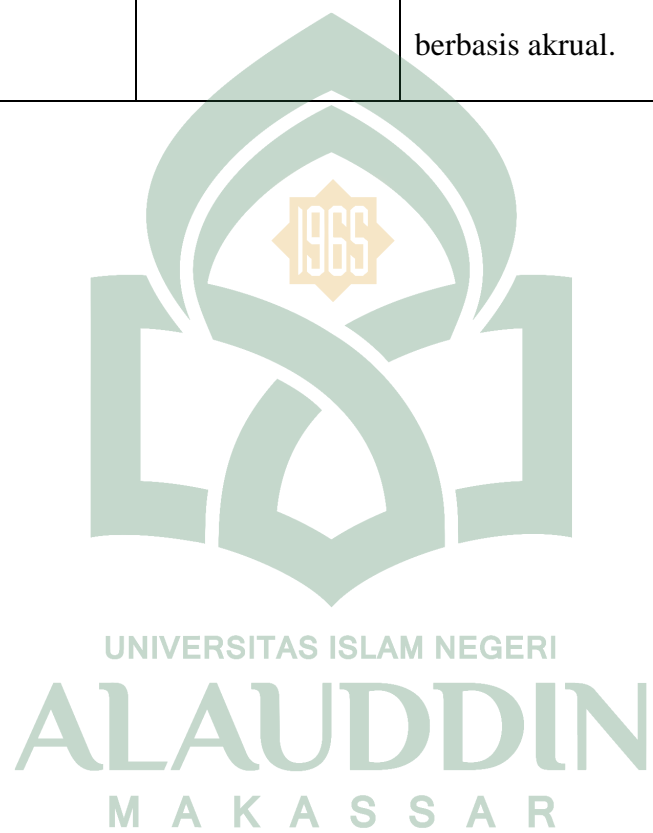
Dari Beberapa Penelitian diatas belum ada yang melaksanakan penelitian tentang Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan, 3 (Tiga) Diantaranya Meneliti Tentang Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sedangkan 1 (Satu) diantaranya meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan. Secara ringkas, hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 1.1, berikut ini:

TABEL 1.1
HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Margareta, A. P, 2015	Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap dalam penerapan SAP akrual, hal tersebut telah dibuktikan dengan para staf bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan.
2.	Ersya Resya Ranilhaj, 2016.	Analisis Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Akuntansi Akrua Pada UnitSatuan Kerja Di Wilayah Kerja Kppn Kota Bogor.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui variabel kualitas teknologi informasi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Variabel tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, dan latar belakang pimpinan tidak berpengaruh terhadap

			implementasi akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor.
3.	Muhamad Indra Yudha Kusuma, 2013.	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah masih sangat rendah. Secara khusus tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.
4.	Sony Lamonisi 2016.	Analisis Penerapan Standar Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai

		<p>Berbasis Akrua</p> <p>Pada Pemerintah</p> <p>Kota Tomohon.</p>	<p>pelatihan pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual.</p>
--	--	---	---



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Teori Stewardship*

Stewardship theory menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengemukakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.⁹

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Gowa. Hubungan antara *steward* dan *principals* dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*). Pemilik sumber daya (*prinsipals*) dengan berbagai keterbatasan mempercayakan (*trust*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak manajemen (*steward*). Oleh karena itu, manajemen pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pelayan (*steward*) bagi masyarakat atas sumber daya yang dimiliki oleh publik.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dengan berpedoman pada standar lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan

⁹Zoelisty. 2014. "*Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid*", Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, 2014), hal. 20.

substansi yang berperan penting dalam kepuasan publik atas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas membutuhkan kinerja yang baik dari aparatur pemerintah termasuk di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepuasan publik, aparatur negara harus memperhatikan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan.

B. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep-konsep teori keagenan di latarbelakangi oleh berbagai teori sebelumnya seperti teori konsep biaya transaksi, teori *property right*, dan filsafat utilitarisme. Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan di tahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan Meckling pada tulisan yang berjudul “*Theory of the Firm*”. Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan).¹⁰ Teori Keagenan (*Agency Theory*) melibatkan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori Keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

¹⁰Setiawan, Wahyu. “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hal . 32

Hubungan antara *agent* (Pemerintah) dan *principal* (Masyarakat) kemungkinan akan timbul suatu masalah apabila terdapat informasi asimetris yang menyebabkan agen melakukan tindakan yang menyimpang, seperti pemanipulasian data, sehingga laporan keuangan terlihat lebih bagus dan memenuhi harapan *principal* meskipun tidak menggambarkan kondisi suatu organisasi yang seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut akuntansi memiliki peranan yang sangat penting khususnya sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam hubungan antara *principal* selaku pemberi amanah dan kekuasaan kepada *agent* untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan *principal*.

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Agency theory* memandang bahwa *agent* tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal*.¹¹

Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa *principal* bersikap netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. *Agent* dan *principal* diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan sering kali kepentingan antara keduanya berbenturan. Menurut pandangan prinsipal, kompensasi yang diberikan kepada agen tersebut didasarkan pada hasil. Sementara, menurut pandangan agen, dia lebih suka jika sistem kompensasi tersebut tidak semata-mata melihat hasil tetapi juga tingkat usahanya. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-

¹¹ibid

pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.¹²

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan.¹³ teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.¹⁴

Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal. Sebagaimana dalam Firman Allah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat: 5/58 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

¹² Lubis, Arfan Ikhsan, *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2, Jakarta: Salemba 4, 2014.

¹³ Syukriy, "agency theory", pdf, Tahun 2011.

¹⁴ Lane, "agency theory", pdf, Tahun 2010.

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An-Nisa: 5/58).¹⁵

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amanat secara sempurna, utuh, tanpa mengulur-ulur atau menunda-nundahnya kepada yang berhak. Amanat ialah ketika kita menanggung sesuatu yang menjadi milik orang lain dan kita bertanggung jawab mengembalikan hal tersebut. Dan dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang di percayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakannya. Ayat ini juga termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam hukum syari'at seperti dalam prinsip-prinsip bisnis islam.

Prinsip bisnis islam Nabi Muhammad Saw mempunyai sifat-sifat yaitu:

1. *Shiddik* (benar dan jujur) adalah sifat Nabi Muhammad Saw, artinya “benar dan jujur”. Jika seorang pemimpin, ia senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya. Benar dalam mengambil keputusan-keputusan dalam perusahaan yang bersifat strategis, menyangkut visi/misi, dalam menyusun objektif dan sasaran serta epektif dan efisien dalam implementasi dan operasionalnya dilapangan.
2. *Amanah* (terpercaya, kredibel) artinya adapat “dipercaya “, bertanggung jawab dan kredibel , dan amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan.

¹⁵Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”,(Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Hal. 87

3. *Fathanah* (cerdas) dapat diartikan sebagai intelektual, ‘kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang *fathanah* artinya pemimpin yang memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.
4. *Thabligh* (komunikatif) adalah orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikan dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi Al-hikmah) jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia haruslah menjadi seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan stakeholder lainnya.¹⁶

Dalam konteks organisasi sektor publik, Pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁷

Dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Juga sesuai dengan amanat undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan basis akrual. Tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja dapat menjadi salah satu

¹⁶Sahdarullah, 2015. “*Empat sifat Nabi dalam mengelolah bisnis*”.

¹⁷Chairunnisa, Darwanis dan Sephi, “*Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*”, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013, hal. 150-174.

tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya akuntabilitas terhadap publik tersebut, perlu dilakukan revitalisasi *e-government* yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah demi kepentingan kesejahteraan masyarakat luas.

C. *Teori Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang keberadaan perusahaan atau pemerintahan dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan kontribusi bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang *Stakeholder theory*, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi.¹⁸

Teori stakeholder umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan. Stakeholder administrasi lokal, yaitu:

¹⁸Mainardes, *Pengaruh Stakeholder Engagement Terhadap Pengungkapan Sustainability report*, 2011.

1. Masyarakat

Yaitu semua fungsi seseorang sebagai individu seperti sebagai pengguna layanan, wajib pajak, suara dalam pemilihan, dan sebagainya. Masyarakat mempengaruhi administrasi lokal melalui pemilihan dan pemungutan suara, serta interaksi sehari-hari mereka dengan administrasi dan politisi. Semakin pesatnya penggunaan internet di kalangan warga masyarakat sedikit banyak mendesak administrasi untuk mengadakan pelayanan secara on line.

2. Bisnis

Bisnis adalah dasar kesejahteraan ekonomi. Bisnis sangat mempengaruhi sistem administrasi politik dan berada dalam hubungan yang konstan.

3. Administrasi publik lain

Administrasi tingkat nasional (federal), regional (kantonal) dan administrasi lokal lainnya dalam kesehariannya memiliki hubungan interaksi dengan administrasi lokal, sehingga dapat terhitung sebagai satu stakeholder penting.

4. Politisi

Politisi dan para pejabat, misalnya presiden atau pemimpin suatu daerah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka.

5. Parlemen dan lembaga peradilan

Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan aturan sebagai kerangka acuan bagi kegiatan administrasi dan interaksinya dengan pihak ketiga.

6. Media

Lembaga administrasi menggunakan media sebagai sumber informasi. Selain itu, media juga berperan sebagai pembuka opini publik melalui penyiaran berita dan topik-topik informasi yang disajikan.

7. Pihak luar negeri

Semakin intensif hubungan sebuah negara dengan dunia luar maka kebijakan dalam negara tersebut disesuaikan dengan aturan-aturan internasional,

8. Tenaga kerja

Kekuasaan administrasi sangat ditentukan oleh karakter dan kapasitas para tenaga kerjanya serta hubungan diantara para tenaga kerja di dalamnya.¹⁹

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran *stakeholder* dan mempengaruhi *stakeholder* pula.

Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu:

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,
2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,

¹⁹Sukmaningrum, Tantriani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 2012.

3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan,
4. LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

D. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sebagaimana dalam Firman Allah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 2/282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.....(QS Al-Baqarah:2/282).²⁰

Dalam ayat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman jika melaksanakan transaksi hutang piutang, melengkapinya

²⁰Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dengan demikian transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat sesuai dengan amanat ayat diatas. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Pemerintah yang baik akan transparan dan akuntabel terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat mengerti.²¹

Dari ayat diatas juga menekankan pada Tata kelolah perusahaan atau pemerintah yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) terlebih khusus prinsip-prinsipnya yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*. *Good Corporate Governance* adalah masukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan atau pemerintahan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan

²¹Rosyada dan Ayu Amrina, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2016, hal. 102-114.

segera.²²*Good Corporate Governance* dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi tentu dengan prinsip-prinsip mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para stekholder.²³ Maka dari itu *Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam implementasi dan optimalisasi suatu kegiatan organisasi baik atau buruknya.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat lebih terukur kinerjanya. Hal tersebut mampu mendorong efisiensi atas kegiatan kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya *good corporate governance*, sehingga tujuan pembangunan untuk memakmurkan rakyat dapat tercapai.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.²⁴ Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat

²²Mustamu dan Ronny H. Dan Lukas William Andypratama, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan*”, Jurnal Agora, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 1-5.

²³Nurwahida. A W, Andi, dan H. Asiah, dkk, “*Hubungan prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Kinerja Pegawai*”, Makassar. Universitas Hasanuddin, 2012.

²⁴Lamonisi dan Sony, “*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2016, hal.223-230.

digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pada dasarnya terdapat empat basis akuntansi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu akuntansi basis kas, akuntansi basis kas modifikasi, akuntansi basis akrual modifikasi, dan akuntansi basis akrual. Keempat basis akuntansi tersebut bersifat berkelanjutan dari basis kas menuju ke basis akrual. Perbedaan keempat basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu pengakuan dan pengukuran suatu transaksi.

Tujuan dari penggunaan basis akrual adalah (a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan; (b) Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset; (c) Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah; (d) Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan; (e) Mereformasi sistem anggaran belanja; (f) Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.²⁵

²⁵Margareta dan Weda Ayu, “Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 9 Tahun 2015, hal. 1-5.

Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia-Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IAI-KSAP) pada tahun 2002 telah memilih basis akrual sebagai dasar pencatatan akuntansi. Basis akrual mengakui transaksi dan kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajiban meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya. Dengan basis akrual, organisasi akan mengakui adanya utang, piutang dan aset.²⁶

Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisasian berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Organisasi sektor publik merupakan semua institusi negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang dibiayai dari dana publik termasuk diantaranya Kementerian Keuangan yang merupakan perangkat pemerintah pusat. Kementerian Keuangan sebagai perangkat pemerintah pusat memiliki satuan kerja (satker) yang berada di bawahnya. Masing-masing satuan kerja memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Selanjutnya satker mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi bersama-sama dengan unit-unit kerja (subsatker) di bawahnya. Karena dana yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana dari pemerintah maka setiap satker

²⁶IAI-KSAP, 2002.

harus menggunakan dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.²⁷

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.²⁸

E. Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrual dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. SAP Berbasis Akrual diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi SAP Berbasis Akrual harus disertai dengan upaya

²⁷ Asfiansyah, Ahdony, "Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah", Jurnal Neo-Bis. Vol. 9 No. 1 Tahun 2015, hal.1-5.

²⁸ Ibid.

sinkronisasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP Berbasis Akrua²⁹. Keterbatasan dari penerapan SAP Berbasis Akrua dinyatakan secara eksplisit pada setiap PSAP yang diterbitkan.

Akuntansi berbasis akrual sangat penting dalam akuntansi karena menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih akan menentukan jenis pelaporan, terutama bentuk laporan, karena akan mempengaruhi informasi maupun unsur yang akan dilaporkan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi susunan standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.

Implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan mempedomani lampiran I PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP Dimensi yang digunakan adalah

- a. Dimensi pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan pengakuan pendapatan pada Laporan Operasional dan pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Dimensi pengakuan beban dan belanja yang diukur berdasarkan pengakuan beban dan pengakuan belanja.
- c. Dimensi akuntansi persediaan yang diukur dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan.

²⁹Margareta dan Weda Ayu, “Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua”, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 9 Tahun 2015, hal. 1-5.

- d. Dimensi akuntansi aset tetap yang diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan serta depresiasi.
- e. Dimensi akuntansi kewajiban yang ini diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban.
- f. Dimensi laporan operasional yang diukur dengan penyajian laporan operasional.
- g. Dimensi laporan perubahan ekuitas yang diukur dengan penyajian laporan perubahan ekuitas.³⁰

Tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual salah satunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan. Keberhasilan implementasi SAP pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya yaitu sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.³¹

³⁰Najati, Ida, 2016. *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 14No.1 Tahun 2016, hal. 1-15.

³¹Kusuma dan Muhamad Indra Yudha, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2013, hal. 5-20.

Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pengelola dari sisi keluaran dan hasil serta pada saat yang sama mengendalikan atas masukan.³²

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi

³²Rahmawati, *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, 2016.

untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.³³

Manfaat dari penggunaan basis akrual (a) Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; (b) Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah (c) Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya; (d) Standar yang dapat diterima umum; (e) Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah; (f) Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional.³⁴

Implementasi akuntansi berbasis akrual juga dapat membawa dampak pada penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan apabila implementasi tidak dilakukan dengan baik. Penerapan akuntansi berbasis akrual memang tidak mudah sehingga kemungkinan kendala dan hambatan akan terjadi, namun disinilah perlunya persiapan yang matang serta mempersiapkan

³³Dewi, Annasia Sophia, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E Government*, 2013.

³⁴Margareta dan Weda Ayu, “Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 9 Tahun 2015, hal. 1-5.

langkah *contingency plan* yang dapat diambil seandainya terjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sehingga tidak berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan.

F. Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas.³⁵ Mardiasmo dalam Ranilhaj(2016) mengungkapkan bahwa teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.³⁶ Berdasarkan Study No 14 yang diterbitkan oleh IFAC-*Public Sector Committee* memberikan beberapa manfaat penggunaan basis akrual. Laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, dan
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

³⁵Mahmud dan Amir Pristiani, “Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan(Sap) Berbasis Akrual Berdasarkan Demografi Pegawai”, Journal Accounting Analysis, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, hal. 1-5.

³⁶Ranilhaj dan Ersya Resya, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Unit Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor”, jurnal Akuntansi, Vol. 3No. 2 Tahun 2016, hal.10-15.

Tujuan utama sektor publik dan sektor swasta adalah berbeda. Tujuan pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk *cost of service* dan *charging for service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.³⁷

Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *akrual basi* dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan, perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta lebih memfokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), sedangkan pada sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*). Meskipun terdapat perbedaan tujuan dalam operasional antara sektor publik dan sektor swasta. Namun dari beberapa pengalaman negara Anggota *Organisationfor Economic Co-Opertion and Development* (OECD) yang telah menerapkan akuntansi akrual pada sektor publik dan menunjukkan keberhasilan, seperti Kanada, Itali, Inggris, Australia, Finlandia, Islandia, dan Selandia Baru.

Pada dasarnya terdapat empat basis akuntansi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu akuntansi basis kas, akuntansi basis kas modifikasi, akuntansi basis akrual modifikasi, dan akuntansi basis akrual.³⁸ Keempat basis akuntansi tersebut bersifat berkelanjutan dari basis kas menuju ke basis

³⁷Ibid.

³⁸Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hal. 1-57.

akrual. Perbedaan keempat basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu pengakuan dan pengukuran suatu transaksi.

Dampak positif dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah banyak diakui oleh para peneliti. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.³⁹ Basis akrual juga tidak lepas dari kelebihan. Kelebihan antara lain: 1. Mampu memperlihatkan akuntabilitas penggunaan seluruh sumber daya serta pengelolaan aset dan kewajiban, 2. Mampu memperlihatkan pendanaan dan pemenuhan kebutuhannya seluruh aktivitas organisasi, 3. Memungkinkan evaluasi kemampuan organisasi dalam mendanai aktivitas serta memenuhi kewajiban dan komitmennya, 4. Memungkinkan evaluasi kinerja biaya dan efisiensi kegiatan.⁴⁰

G. Kualitas pelaporan keuangan pemerintahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga tuntutan publik terhadap kinerja aparatur pemerintahan semakin besar, terutama mengenai kurang optimalnya atau masih minimnya tingkat produktivitas kerja aparatur pemerintah, oleh karena itu, akhir-akhir ini fokus terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi isu yang

³⁹Lamonisi dan Sony, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon", Jurnal Emba, Vol. 4 No.1 Tahun 2016, hal.223-230.

⁴⁰Suharso, *Basis Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*, 2016.

ramai dibicarakan. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, maka produktivitas kerja akan, semakin meningkat, dalam artian aparatur pemerintah akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dan dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaporan keuangan termasuk di BAPPEDA Kabupaten Gowa.

Dalam rana pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dalam laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten memiliki semangat tinggi dan menjunjung nilai-nilai sosial agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan terpercaya, Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan SKPD dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Bukti empiris adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap

kualitas laporan keuangan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ada beberapa Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu;

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut

2. Teknologi

merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*, misalnya) yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas.

3. Peran PPK-SKPD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas, antara lain: melaksanakan akuntansi SKPD; menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

4. Rekonsiliasi

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel.

5. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.⁴¹

Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan

⁴¹Pradono, Febrian Cahyo. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe), Hal. 188 – 200, Thun 2015, Vol. 22, No. 2 Issn: 14123126.

pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*).

b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

1. Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

3. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

4. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.⁴²

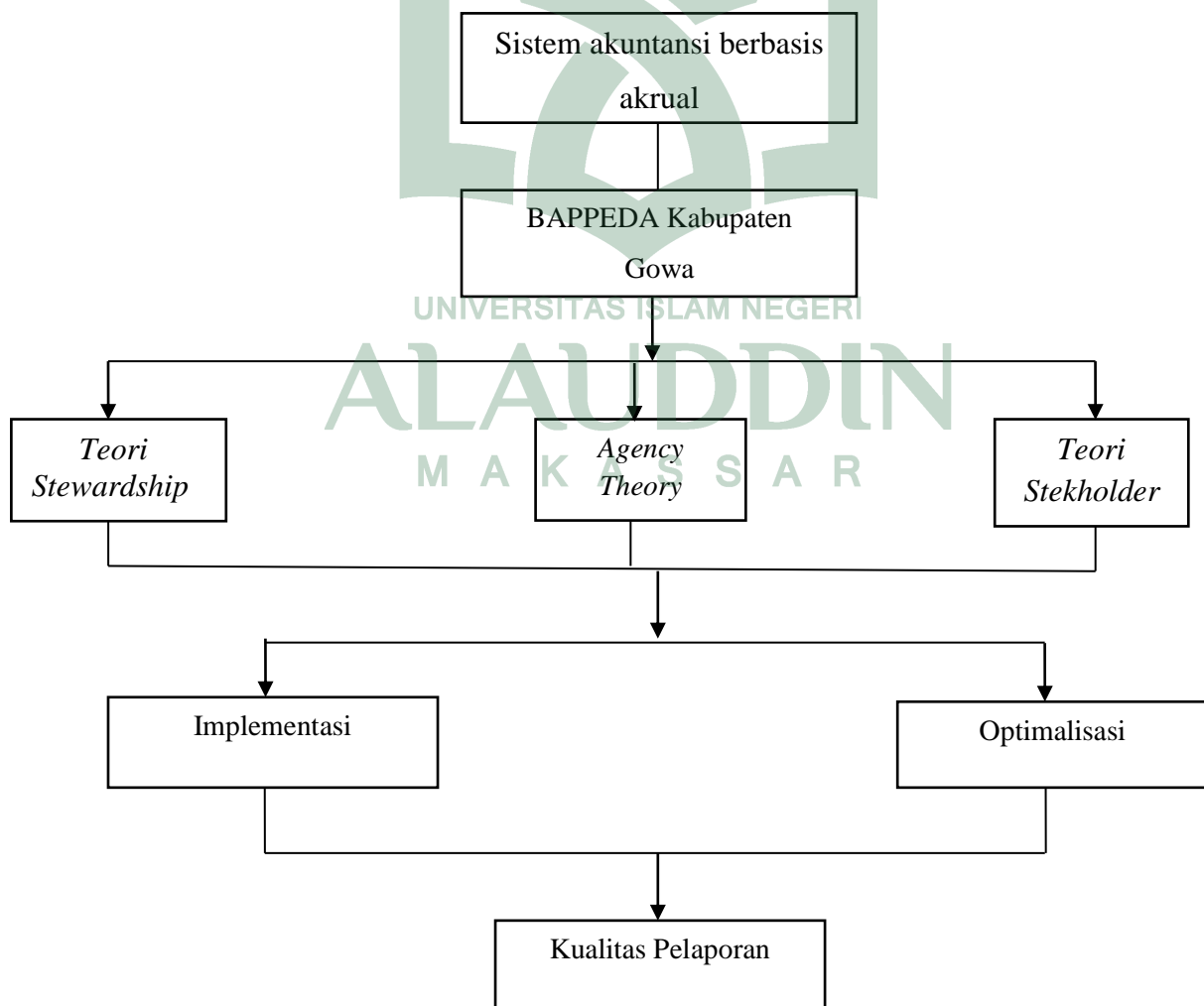


⁴²Sukmaningrum, Tantriani . Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang), *Skripsi*. Tahun 2012.

H. Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang Implementasi dan Optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas kerja pemerintahan. Dengan adanya kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Gambar 1.1
Rerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁴³ Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.⁴⁴ Dengan metode kualitatif, maka data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.⁴⁵

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁶ Pada umumnya,

⁴³Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro, *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, Edisi Pertama, (BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta, 2013), hal. 12.

⁴⁴Abdullah, M. Wahyuddin dan Eva Mudalifa, *Analisis Kritis Professional Judgment Berdasarkan International Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik*, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan, Malang, 2015.

⁴⁵Dewi, Listya Kanda, *Akuntan Publik Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi*, Pdf, 2013

⁴⁶Moleong L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya, Bandung, 2010.

penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis karena merupakan penelitian non hipotesis.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti lebih mendalam mengenai implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Fenomenologi*. *Fenomenologi* mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena, pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi merupakan salah satu metode penelitian dapat memahami fenomena berdasarkan interaksi sosial. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi.⁴⁷

C. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data terdiri dari dua, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai BAPPEDA Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selainitu, data lain yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi, seperti dokumentasi berupa foto dan rekaman.

⁴⁷Kuswarno, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Alfabet, Bandung, 2011)..

2. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia, berupa data atau dokumen terkait sistem akuntansi berbasis akrual dan dokumen lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengadakan pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau personel yang terkait seputar pokok permasalahan penelitian.
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data sekunder dari BAPPEDA Kabupaten Gowa berupa laporan-laporan, catatan-catatan, dan rekaman data kinerja dan materi pendukung lainnya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi pada entitas yang akan dijadikan objek

penelitian untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat yang berguna dalam penelitian.

2. Teknik analisi data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut. Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan.
2. Mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Gowa.
3. Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Biasanya ada empat teknik yang digunakan yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teori, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, akan tetapi dalam penelitian ini hanya dua teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber

data pendukung seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat.

- b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan / Instansi

Pada tahun 1981 didirikan satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 tahun 1981, diawal pembentukannya, satuan kerja ini dipimpin oleh seorang pimpinan dengan eselon III-a yang disebut Ketua BAPPEDA, dan didukung oleh perangkat pejabat eselon IV dan eselon V. Selanjutnya pada tahun 1995 dilakukan penyesuaian kelembagaan seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995, dimana Kabupaten Gowa selain menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang menjadi urusan pangkal juga telah melaksanakan urusan pemerintah pusat (sebanyak 18 urusan) dan urusan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sebanyak 8 urusan) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 1995. Bentuk ke lembaga BAPPEDA berpedoman pada Kemendagri Nomor 44 Tahun 1995 dan Keputusan Menpan Nomor 16 Tahun 1995.

Selanjutnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dilakukan pula penyesuaian eselonisasi kelembagaan Daerah, dimana pimpinan BAPPEDA menjadi eselon II-b dan para Kepala Bidang menjadi eselon III-b dan pejabat Kepala Seksi dan Kepala Urusan menjadi eselon IV-a. Pada tahun 2008, kembali dilakukan penyempurnaan kelembagaan dengan hanya meliputi 1 pimpinan kelembagaan yang disebut

Kepala, dibantu 1 Sekretaris yang membawahi 3 Kepala Subbagian dan 4 kepala Bidang serta Kepala Subbidang.

Sejak pembentukannya pertama kali, BAPPEDA Kabupaten Gowa telah dipimpin oleh 9 orang Ketua dan Kepala, masing-masing Drs. H. Hasan Husain (tahun 1980-1983), Drs. Andi Baso Syarif (tahun 1983- 1986), Drs. H. Mustafa Rauf (tahun 1986-1990), Drs. H. Mapparessa Tutu (1990- 1997), Drs. H. Muh. Amir Rizal (tahun 1997-1999), Drs. H. Mustamin Sanusi, M. Si (tahun 1999-2004), Drs. H. Muh. Yusuf Sommeng, M. Si (tahun 2004), Drs. H. Muh. Arsyad, MM (tahun 2004-2006), Drs. H. Baharuddin Mangka, M. Si (tahun 2006-2014), H. Muchlis, SE, M. Si (tahun 2014-2015), Andi Kumala Idjo, SH (tahun 2015-2017), Taufiq Mursad, ST (2017-sekarang).

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan structural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Bupati Gowa nomor 42 tahun 2008. Adapun tugas pokok Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik serta kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum kondisi internal dan eksternal Bappeda Kabupaten Gowa cukup kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Hal demikian

diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat di dalam mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Gowa lima sampai dua puluh tahun kedepan diarahkan kepada perwujudan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk mencapai harapan yang dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi secara fungsional Bappeda Kabupaten Gowa dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan. Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 setiap SKPD harus memiliki rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Visi dan Misi Organisasi

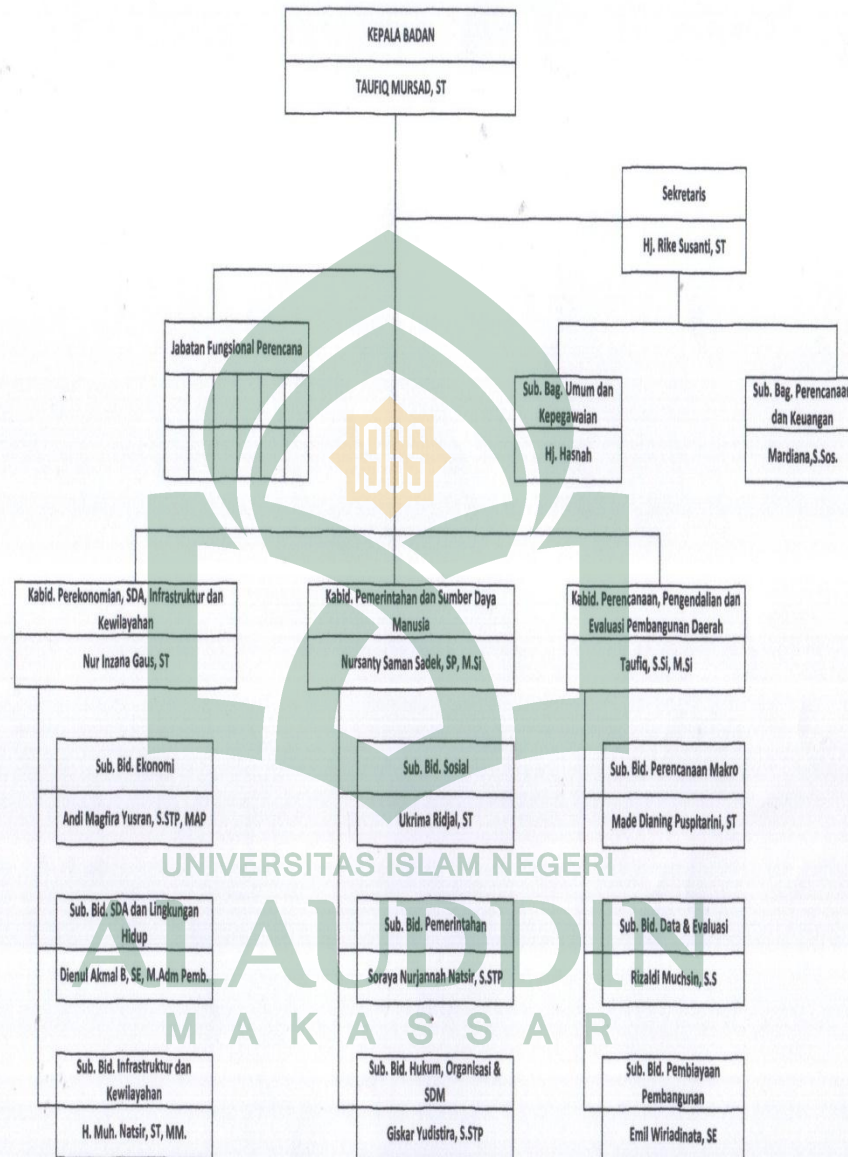
1. VISI

“ Menjadikan Bappeda Kabupaten Gowa sebagai Badan Perencanaan yang Profesional dan memiliki integritas, dedikasi serta komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif”

2. MISI

1. Menyusun Perencanaan Pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang secara partisipatif.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD dan antar daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan di Kab. Gowa.
3. Menetapkan sistem pengelolaan data-data pembangunan yang efisien dan efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan akuntabel.
4. Memberikan arah pada seluruh elemen Pembangunan dalam menerjemahkan program / kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan bagi peningkatan kualitas di segala bidang pembangunan.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



Tabel 1.2
Rekapitulasi Analisis Beban Kerja (Abk)

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan		1	
2	- Sekretaris Badan		1	
3	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1	
4	- Pengadministrasi Umum		3	
5	- Pengadministrasi Kepegawaian		1	
9	- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		1	
10	- Penyusun Bahan Program		1	
	- Pengadministrasi Bahan Program		1	
	- Bendahara Pengeluaran		1	
11	- Bendahara Gaji		1	
	- Bendahara Materil		1	
11	- Penatausaha Laporan Keuangan		1	
20	- Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan		1	
21	- Kepala Sub. Bidang Ekonomi		1	
22	- Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Ekonomi		1	
23	- Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Keuangan		1	
24	- Kepala Sub. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup		1	
25	- Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup		1	

26	-	Pengadministrasi Umum	1
24	-	Kepala Sub. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1
25	-	Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1
26	-	Pengolah Laporan Pelaksanaan Program	1
27	-	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	1
28	-	Kepala Sub. Bidang Sosial	1
29	-	Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Sosial	1
30	-	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Keuangan	1
31	-	Kepala Sub. Bidang Pemerintahan	1
32	-	Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Pemerintahan	1
33	-	Pengadministrasi Umum	1
31	-	Kepala Sub. Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1
32	-	Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1
33	-	Pengolah Laporan Pelaksanaan Program	1
34	-	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1
35	-	Kepala Sub. Bidang Perencanaan Makro	1
36	-	Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Perencanaan Makro	1
37	-	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Keuangan	1
38	-	Kepala Sub. Bidang Data dan Evaluasi	1
39	-	Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Data dan Evaluasi	1
40	-	Pengadministrasi Umum	1
38	-	Kepala Sub. Bidang Pembiayaan Pembangunan	1
39	-	Penyusun Bahan Rencana Program Sub. Bidang Pembiayaan Pembangunan	1
40	-	Pengolah Laporan Pelaksanaan Program	1
KELEBIHAN/KEKURANGAN PEGAWAI			44

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di BAPPEDA Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan. Seperti yang diungkapkan oleh kepada badan BAPPEDA,

”BAPPEDA ini mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 sampai sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengingat bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan hal baru maka pegawai kami mengalami banyak kesulitan dalam pelapoeannya”⁴⁸

Menurut KSAP (2010), pada tahun 2010 telah diadakan sosialisasi mengenai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi

⁴⁸Taufiq Mursad, ST, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 05 juni 2017.

pemerintahan berbasis akrual, Seperti yang diungkapkan oleh kepada badan BAPPEDA Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2011 penyiapan peraturan pelaksanaan, kebijakan akuntansi dan sistemnya sudah harus ada serta sosialisasi lanjutan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 dilakukan capacity building atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sosialisasi dan pelatihan serta dilakukan lanjutan pengembangan sistem kemudian pada tahun 2013 implementasi percobaan sistem di beberapa pemerintah daerah telah dilakukan. Pada tahun 2014 dilakukan implementasi paralel akuntansi akrual dan akuntansi kas menuju akrual untuk seluruh SKPKD hingga penerapan basis akrual penuh pada tahun 2015”⁴⁹

Teori *stakeholder* juga menjelaskan tentang keberadaan pemerintahan dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan kontribusi bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran *stakeholder* dan mempengaruhi *stakeholder* pula. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual harus didukung oleh berbagai pihak terutama sumber daya manusianya, dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual ada beberapa kendala yang terjadi, seperti yang diungkapkan staf bagian keuangan yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi pada saat itu yaitu soal pemahaman, belum bisa full memahami sistem tersebut. Kemudian persoalan SDM-nya juga menjadi kendala karena masih sebagian kecil saja yang memahami teknis sistem tersebut pada saat itu, tetapi alhamdulillah sampai saat ini berkat kerja keras pegawai, kami dan seluruh masyarakat dapat menikmati manfaatnya seperti Laporan keuangan yang diperoleh akan lebih akurat karena setiap

⁴⁹*Ibid*, Hal 49

transaksinya tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan, gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintahan, lebih komprehensif dalam penyajian informasinya”⁵⁰

Dalam basisnya AL-Qur'an, Islam sudah mengajarkan kepada umatnya kinerja harus dinilai. Ayat yang harus menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah QS. At-Taubah ayat: 9/105 yang berbunyi

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah ayat: 9/105).⁵¹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, "Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-

⁵⁰Mardiana,S.Sos, Sub. Bag.Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kabupaten Gowa, Wawancara, Sungguminasa, 06 Juni 2017.

⁵¹Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu.

Dengan pelaporan berbasis akrual, penggunaan dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan pendanaanya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Sesuai yang diungkapkan oleh kepala BAPPEDA yang menyatakan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dengan berpedoman pada standar lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan substansi yang berperan penting dalam kepuasan publik atas pengelolaan keuangan di kantor ini. Pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas membutuhkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepuasan publik, aparatur instansi ini harus memperhatikan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan.”⁵²

Stewardship theory menegaskan bahwa situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengemukakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan

⁵²Taufiq Mursad, ST, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Wawancara, Sungguminasa, 05 juni 2017.

kesuksesan organisasi. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Dari wacana-wacana dan dipertegas oleh teori di atas dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut dengan mengikuti sosialisasi atau pelatihan sehingga kualitas pelaporan pemerintahan dapat terlihat/terukur dari hasil atau manfaat yang telah didapatkan selama menggunakan sistem tersebut. Sementara tujuan pemerintah menerapkan sistem akrual yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sudah mengimplementasikan sesuai dengan tujuan pemerintah.

2. *Optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual di BAPPEDA Kabupaten Gowa.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 dan seterusnya. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.

Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh staf bagian keuangan yang menyatakan bahwa:

“Akuntansi berbasis akrual lebih dipercaya dan akurat dalam menghasilkan informasi yang akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya

perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Pencatata seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, dan dapat juga mengukur kinerja, basis akrual menyediakan informasi penggunaan sumber daya ekonomi sebenarnya.”⁵³

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa konsep yang mendasari pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Dalam menyusun pelaporan keuangan, agen dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban menyajikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya dalam hal ini sebagai prinsipal yang bertindak dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan.

Perbandingan Komponen laporan keuangan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual dilihat dari tabel dibawa ini:

⁵³Mardiana,S.Sos, Sub. Bag.Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 06 Juni 2017.

Tabel 1.3
Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas
Menuju AkruaI dan Basis AkruaI

Komponen laporan keuangan basis kas menuju akrual.	Komponen laporan keuangan berbasis akrual
1. Laporan realisasi anggaran (LRA)	1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Neraca	2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3. Laporan arus kas (LAK)	3. Neraca
4. Catatan atas laporan keuangan (CLAK)	4. Laporan operasional
	5. Laporan arus kas
	6. Laporan perubahan ekuitas
	7. Catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan harus menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2015-2016. Laporan keuangan SKPD antara lain terdiri dari:

- (1) *Laporan Realisasi Anggaran* menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (a). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Unsur-unsur LRA dalam basis akrual:

- Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Surplus/defisit-LRA
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali

dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

(2) *Neraca* yang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal dan periode tertentu. Unsur neraca dalam basis akrual adalah:

- Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

(3) *Laporan Perubahan Ekuitas* menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- Ekuitas awal
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- Ekuitas akhir.

(4) *Laporan Operasional* merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-Unsur Laporan Operasional adalah:

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- Beban dari kegiatan operasional ;
- Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- Pos luar biasa, bila ada;

- Surplus/defisit-LO.

(5) *Catatan atas Laporan Keuangan* meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Sistem akuntansi berbasis akrual juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.⁵⁴

Tabel 1.4

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2016

URAIAN	SALDO		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	2015	2016		
Beban Gaji dan Tunjangan –	1.958.243.560,-	2.203.094.096,-	239.388.344,-	12,22
Beban Tambahan Penghasilan PNS –	106.590.000,-	108.855.000,-	2.265.000,-	2,12
Beban Uang Lembur PNS –	237.532.000,-	217.375.000,-	(20.157.000,-)	(8,49)
Beban Uang Lembur Non PNS –	-	1.380.000,-	1.380.000,-	-
Beban Honor Bulanan	35.700.000,-	44.800.000,-	9.100.000,-	25,49
Beban Honorarium Pegawai Honorer	-	34.650.000,-	34.650.000,-	-
Jumlah	2.338.065.560,-			11,63

⁵⁴BAPPEDA, Catatan atas Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2015, *Hasil Penelitian*, Gowa, 13 Maret 2017.

		2.610.154.096,-	272.088.536,-	
--	--	------------------------	----------------------	--

Sumber: Data sekunder yang didapatkan

Sesuai dengan tabel dapat diketahui bahwa kualitas kerja pegawai di BAPPEDA Kabupaten Gowa meningkat dari tahun 2015 sampai 2016 dengan rincian beban pegawai pada tahun 2015 menggunakan anggaran Rp. **2.338.065.560** sedangkan pada tahun 2016 menggunakan anggaran **2.610.154.096**, sesuai yang di ungkapkan oleh informan yaitu:

“Antusias pegawai BAPPEDA Kabupaten Gowa dalam mengimplentasikan dan mengoptimisasikan Akuntansi berbasis akrual itu sudah sangat tinggi melihat anggaran yang digunakan dari tahun 2015 sampai tahun 2016 itu meningkat, kenapa anggaran yang di gunakan sangat tinggi karena kita ketahui bahwa sistem akuntansi berbasis akrual bisa dikatakan rumit jadi butuh dana-dana seperti dana lembur dll”.⁵⁵

1. Pelaporan Keuangan Skpd Rincian Beban Operasi Tahun 2015 Dan 2014

Tabel 1.5
Rincian Beban Operasi Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	SALDO		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	2015	2014		
Beban Pegawai – LO	2.302.365.560,-	-	2.302.365.560,-	-
Beban Barang dan Jasa	2.041.765.333,-	-	2.041.765.333,-	-

⁵⁵Taufiq Mursad, ST, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Wawancara, Sungguminasa, 05 juni 2017.

Beban Penyusutan dan Amortisasi	123.785.729,-	-	123.785.729,-	
Jumlah	4.467.916.622,-	-	4.467.916.622,-	-

Sumber: Data Sekunder yang didapatkan.

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2015.

Anggaran Bappeda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp. 4.600.036.537,- terdiri dari :

Tabel 1.6

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan tahun 2015

URAIAN	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
Gaji Pokok PNS	Rp. 1.537.316.223,-	-
Tunjangan Keluarga	Rp. 120.705.368,-	-
Tunjangan Jabatan	Rp. 174.126.225,-	-
Tunjangan Umum	Rp. 60.899.050,-	-
Tunjangan Beras	Rp. 93.476.656,-	-

Tunjangan PPh	Rp. 31.313.169,-	-
Pembulatan Gaji	Rp. 29.530,-	-
Belanja Pegawai	-	Rp. 412.634.000,-
Belanja Barang/Jasa	-	Rp.1.975.736.315,-
Belanja Modal	-	Rp. 51.800.000,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 141.000.000,-	-
JUMLAH	Rp.2.158.866.222,-	Rp.2.441.170.315,-

Sumber: Data Sekunder yang didapatkan.

Pada Tahun Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Gowa melaksanakan Program yang berkaitan dengan kinerja pegawai sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.508.905.275,- terealisasi sebesar Rp.481.722.574,- (94,66%). Anggaran tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp.66.000.000,- realisasi sebesar Rp.55.727.250,- (84,44%). Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai layanan jasa komunikasi telepon dan layanan jasa penerangan listrik kantor.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.43.741.000,- realisasi sebesar Rp.42.540.900,- (97,26%), Kegiatan ini bertujuan melaksanakan pengadministrasian keuangan termasuk

membiayai honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pejabat Pengurus & Penyimpan Barang Milik Daerah dan para Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, sehingga pengelolaan keuangan berjalan tertib dan akuntabel.

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.4.769.400,- (95,39%). Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi penggantian alat-alat listrik dan peralatan elektronik kantor.
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.5.010.375,- realisasi sebesar Rp.5.010.150,- (100%). Kegiatan ini diperuntukkan untuk pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.6.800.000,- realisasi sebesar Rp.6.785.000,- (99,78%). Dengan demikian tersedia bahan bacaan yang akan meningkatkan pengetahuan pegawai dan sarana publikasi yang memadai dalam penyampaian informasi serta pembiayaan iklan ucapan selamat.
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.314.715.000,- realisasi sebesar Rp.299.266.689,- (95,05%). Kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam daerah/tingkat kabupaten (dataran rendah & dataran tinggi) dan luar daerah di tingkat provinsi dan luar provinsi, dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi program pembangunan daerah.

7. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.67.638.900,- realisasi sebesar Rp.67.623.185,- (99,98%) Kegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.
2. Pelaksanaan jasa persuratan kantor (pembuatan, penerimaan, dan pendistribusian).⁵⁶

Dengan demikian terlayannya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.060.000,- terealisasi sebesar Rp.165.406.489,- (97,69%). Anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.32.600.000,- realisasi sebesar Rp.32.600.000,- (100%). Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal, sebagai berikut :

1. Pengadaan Personal Komputer
2. Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Printer & Anti Virus)
3. Pengadaan Kursi Kerja
4. Pengadaan Fax

⁵⁶BAPPEDA, Catatan atas Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2015, *Hasil Penelitian*, Gowa, 13 Maret 2017.

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp.63.730.000,- realisasi sebesar Rp.62.611.318,- (98,24%). Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Layanan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.25.730.000,- realisasi sebesar Rp.24.100.000,- (93,66%). Kegiatan ini ditujukan untuk perbaikan/service (AC,komputer,printer), penggantian kompresor, penggantian spare part monitor dan sehingga peralatan kantor dapat terus terpelihara dengan baik.⁵⁷

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp.33.210.000,- terealisasi sebesar Rp.33.210.000,- (100%). Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.860.000,- realisasi sebesar Rp.18.860.000,- (100%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi pegawai Bappeda.
- b. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.350.000,- realisasi sebesar Rp.14.350.000,- (100%).

⁵⁷*Ibid*, Hal 57

Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan Pakaian Olahraga bagi pegawai Bappeda.⁵⁸

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dengan alokasi anggaran Rp.25.910.000,- realisasi sebesar Rp.15.175.000,- (58.57%). Anggaran tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

“Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan jumlah anggaran sebesar Rp.25.910.000,- realisasi sebesar Rp.15.175.000,- (58.57%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas bagi aparat Bappeda dalam rangka pengembangan kapasitasnya perjalanan dinas luar daerah (provinsi) dan Kontribusi Pelatihan.⁵⁹

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran Rp.23.911.040,- terealisasi sebesar Rp.23.911.000,- (100%). Anggaran tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

“Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp.23.911.040,- realisasi sebesar Rp.23.911.000,- (100%). Produk

⁵⁸BAPPEDA, Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2015, *Hasil Penelitian*, Gowa, 13 Maret 2017.

⁵⁹*Ibid.* Hal 59.

yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester dan pada Akhir Tahun 2015, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2016.

Anggaran Bappeda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.6.407.818.499,20,-** terdiri dari :

Tabel 1.7

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan tahun 2016

URAIAN	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
Gaji Pokok PNS	Rp. 1.674.250.662,00,-	-
Tunjangan Keluarga	Rp. 127.564.568,95,-	-
Tunjangan Jabatan	Rp. 192.648.750,00,-	-
Tunjangan Umum	Rp. 55.247.500,00,-	-
Tunjangan Beras	Rp. 95.100.320,00,-	-
Tunjangan PPh	Rp. 35.493.835,30,-	-
Pembulatan Gaji	Rp. 26.647,95,-	-
Belanja Pegawai	-	Rp. 793.835.000,00,-
Belanja Barang/Jasa	-	Rp.2.994.061.215,00,-
Belanja Modal	-	Rp. 314.190.000,00,-

Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 125.400.000,-	-
JUMLAH	Rp.2.305.732.284,20,	Rp.4.102.086.215,00,-

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Pada Tahun Anggaran 2016 Bappeda Kabupaten Gowa melaksanakan Program yang berkaitan dengan kinerja pegawai sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422.628.415,- terealisasi sebesar Rp. 407.581.269,- (96,43%). Anggaran tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 68.422.365,- realisasi sebesar Rp. 55.137.234,- (80,58%). Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai layanan jasa komunikasi telepon dan layanan jasa penerangan listrik kantor.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.55.419.500,- realisasi sebesar Rp.55.399.500,- (99,96%), Kegiatan ini bertujuan melaksanakan pengadministrasian keuangan kantor, antara lain penganggaran, pengelolaan, pencairan, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksaan keuangan secara tertib dan akuntabel.
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.4.999.400,- (99,99%). Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi penggantian alat-alat listrik dan peralatan elektronik kantor.

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.7.509.000,- realisasi sebesar Rp.6.232.842,- (83%). Kegiatan ini diperuntukkan untuk pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.8.800.000,- realisasi sebesar Rp.8.440.000,- (95,91%). Dengan demikian tersedia bahan bacaan yang akan meningkatkan pengetahuan pegawai dan sarana publikasi yang memadai dalam penyampaian informasi serta pembiayaan iklan ucapan selamat.
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.180.396.000,- realisasi sebesar Rp.180.304.243,- (99,95%). Kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam daerah/tingkat kabupaten (dataran rendah & dataran tinggi) dan luar daerah di tingkat provinsi dan luar provinsi, dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi program pembangunan daerah.
7. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.97.081.550,- realisasi sebesar Rp.97.068.050,- (99,99%) Kegiatan ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan
 - b. Pelaksanaan jasa persuratan kantor (pembuatan, penerimaan, dan pendistribusian).⁶⁰

⁶⁰BAPPEDA, Cacatan atas Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2016, *Hasil Penelitian*, Gowa, 13 Maret 2017.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.327.000,- terealisasi sebesar Rp.232.044.440,- (96,00%). Anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi sebesar Rp. 41.234.000,- (82,47%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebanyak 2 (dua) unit.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.67.190.000,- realisasi sebesar Rp.67.188.000,- (99,99%). Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal, sebagai berikut :
 1. Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Cabinet)
 2. Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Gordyn, Sekat Ruangan)
 3. Pengadaan Alat Pendingin (Air Conditioner)
 4. Pengadaan Komputer (Komputer PC)
 5. Pengadaan Peralatan Personil Komputer (Printer, Hard Disk Eksternal)
 6. Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon III dan Eselon IV

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp.106.687.000,- realisasi sebesar Rp.105.172.440,- (98,58%). Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Layanan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.450.000,- realisasi sebesar Rp.18.450.000,- (100%). Kegiatan ini ditujukan untuk perbaikan/service (AC, komputer, printer), penggantian kompresor, penggantian spare part monitor/CPU komputer sehingga peralatan kantor dapat terus terpelihara dengan baik.⁶¹

c. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp.53.250.000,- terealisasi sebesar Rp.53.250.000,- (100%). Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.750.000,- realisasi sebesar Rp.24.750.000,- (100%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi pegawai Bappeda.
2. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.28.500.000,- realisasi sebesar Rp.28.500.000,- (100%).

⁶¹*Ibid.* Hal 65

Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan Pakaian Olahraga bagi pegawai Bappeda.⁶²

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dengan alokasi anggaran Rp.279.655.250,- realisasi sebesar Rp.279.584.250,- (99,97%). Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan jumlah anggaran sebesar Rp.104.655.250,- realisasi sebesar Rp.104.654.350,- (99,99%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dan kontribusi biaya pendidikan bagi aparatur Bappeda untuk mengikuti diklat, sosialisasi, pelatihan, seminar, bimtek, dan lain sebagainya dalam rangka pengembangan kapasitasnya.
2. Studi Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran dengan jumlah anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi sebesar Rp.174.929.900,- (99,96%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam rangka studi pemahaman perencanaan dan penganggaran.

⁶²*Ibid.*

e. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran Rp.23.911.040,- terealisasi sebesar Rp.23.911.000,- (100%). Anggaran tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.019.200,- realisasi sebesar Rp.32.907.000,- (99,66%). Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester Awal dan Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester Akhir tahun 2016, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sesuai yang diungkapkan oleh informen:

“ iya dari lima program yang telah dilakukan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dari program yang telah dilaksanakan kita dapat mengetahui kualitas laporan keuangan yang telah disajikan, yang dimana program tersebut Alhamdulillah berjalan dengan efektif dan efisien dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dalam meningkatkan kualitas pelaporan selama menggunakan sistem akrual tersebut, iya Alhamdulillah sampai sekarang manfaatnya sudah bisa dirasakan sampai sekarang”.⁶³

⁶³Hj. Rike Susanti, ST, Sekertasis Bappeda Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 16 Juni 2017

Dari penjelasan diatas mengenai tentang Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 membuktikan bahwa tingkat kualitas pelaporan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa itu meningkat dari tahun 2015-2016, sesuai yang diungkapkan oleh informen yaitu:

“iya untuk mengetahui optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan harus memperhatikan pencapaian ikhtisar realisasi target kinerja keuangan pada instansi tersebut dan hasilnya meningkat dari tahun 2015-2016 dan harus memperhatikan program-program yang dilaksanakan yang berkaitan dengan kualitas kerja pemerintahan seperti, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, apakah dari program-program tersebut sudah berjalan secara efektif atau efisien, kita ketahui bersama bahwa ada empat karakteristik dalam kualitas laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.”⁶⁴

Dari pembahasan diatas dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa di lihat dari Perbandingan Komponen laporan keuangan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual dan rincian-rincian anggaran dan pelaporan yang telah dilaksanakan begitupun dengan program-program yang terlaksana sudah mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁴Hj. Rike Susanti, ST, Sekertasis Bappeda Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 05 Juni 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelaporan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa BAPPEDA Kabupaten Gowa telah antusias mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem ini.

2. Optimalisasi sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa, peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrul dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sudah berjalan secara efektif dan efisien dilihat dari program-program yang telah dijalankanya yang berkaitan dengan masalah

kepegawaian sudah berjalan sebagai mana mestinya dari tahun 2015 sampai pada tahun 2016 yang dimana program tersebut terdiri dari yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang telah ditemukan sebagai berikut : (1) Diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan basis akrual. (2) Masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staf bagian keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa akan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. (3) Harus sering melakukan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan sistem akuntansi berbasis akrual agar pengimplemension dan pengoplimalan lebih efektif dan efisien. (5) Masih perlu dilakukan pengkajian kondisi SDM pemerintahan yang ada di pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa yang melakukan pengelolaan keuangan. (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowaharus lebih menyiapkan SDM yang berintegritas tinggi dan akuntabel. (7) Tingkat dan latar belakang pendidikan SDM sebaiknya dari akuntansi, minimal strata 1 (S1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Wahyuddin & Eva Mudalifa, 2015. Analisis Kritis Professional Judgment Berdasarkan International Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan, Malang.
- Anwar, Ayu Ardhillah, 2013. Analisis Perspektif *Stakeholder* Terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility* (Csr). *Jurnal*.
- Apriani, Tini, 2015. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Kabupaten Serang. *Jurnal Bina Praja*, 7(4): 289 – 300.
- Asfiansyah, Ahdony, 2015. Strategi Implementasi Akuntansi Akrua Pada Pemerintah Daerah, *Jurnal Neo-Bis*. 9(1)1-5.
- Chairunnisa, Darwanis dan Sephi, 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2)150-174.
- Dewi, Listya Kanda, 2013. Akuntan Publik Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi, *Pdf*.
- Dewi, Annasia Sophia, 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E Government, *Jurnal*.
- Donaldson, Lexdan Davis, James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder. Dalam *Australian Journal of Management*, 16 (1)49-65.
- Fernanda, Rahadian, 2016. Pengaruh Kompetensi, Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kerja Karyawan, *jurnal Nominal*, 5(1)81-83.
- Hafid, 2016. Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Melalui Sistem Manajemen Kinerja Yang Berorientasi Pada Output. *Jurnal*.
- Handhayani, Meynalti 2015. Pengaruh Kualitas Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Solok, *jurnal*.
- Hao, Laoshi, 2013, Skripsi, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai Di Kantor Pertanahan Kota Banjar, *jurnal*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2014. Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua. *Modul*.
- Khumaedi, Evawati, 2016. Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja

- Pegawai Pada Dinas Sentra Oprasi Terminal, *jurnal Ilmu Manajemendan Bisnis*, 2(1):66-70.
- Kusuma, Muhamad Indra Yudha, 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(1)5-20.
- Kuswarno, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabet, Bandung.
- Lamonisi, Sony, 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Emba*, 4(1)223-230.
- Lubis, Arfan Ikhsan, 2014. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2, Jakarta: Salemba 4.
- Mahennoko, Anandhika Angga, 2011. Pengaruh Motivasi Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, *jurnal*.
- Mahmud, Amir Pristiani, 2016. Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrual Berdasarkan Demografi Pegawai, *Journal Accounting Analysis*, 5(1):1-5.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 1-57.
- Margareta, Weda Ayu, 2015. Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9):1-5.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2010. *Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Rineka Aditama.
- Mainardes, 2011. Pengaruh *Stakeholder Engagement* Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*. *Jurnal*.
- Moleong L.J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya. Bandung.
- Mustamu, Ronny H. Dan Lukas William Andy pratama, 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan, *Jurnal Agora*, 1(1):1-5.
- Najati, Ida, 2016. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 14(1)1-15.
- Noviyanti, Mimin Aminah, 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Dan Pengalaman Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Dan

- Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung*. 3(1)21-41.
- Nurwahida.A W, Andi, dan H. Asiah, dkk, 2012. Hubungan prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dengan Kinerja Pegawai. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Pradono, Febrian Cahyo, 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, Hal. 188 – 200 Vol. 22, No. 2 Issn: 1412-3126.
- Pristiani, 2015. Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrua Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Jabatan. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*. 3(1)1-10.
- Rahmawati, 2016. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *jurnal*.
- Ranilhaj, Ersya Resya, 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrua Pada Unit Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor, *jurnal Akuntansi*, 3(2)10-15.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua”.
- Republik Indonesia, “Permendagri No 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017”.
- Rosyada, Ayu Amrina 2016. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda, *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 4(1) 102-114.
- Sahdarullah, (2015). Empat sifat Nabi dalam mengelola bisnis.
- Setiawan, Wahyu, 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Sulaeman, Abdul Hamid, Mukhlis Yunus, 2015. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pegawai Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4 (4)112-121.

- Suharso, 2016. Basis Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia, *Artikel*.
- Sukmaningrum, Tantriani , 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *skripsi*.
- Supomo, Bambang & Nur Indriantoro, 2013. *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, Edisi Pertama, BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta, hal. 12.
- Sujana, Edy, Dkk, 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng), *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. 3(1)1-4.
- Sumaryati dan Lako, 2015. Kompetensi SDM Jadi Kebutuhan. *Google*.
- Yuliasari, Puspita, 2013. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kerja, *Google*.
- Winda, Ekasari. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kampar), *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UR, Riau.
- Zoelisty, Capridiea. 2014. Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.

L

A

M

P

I

R

A

N





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



















KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 1884/EB.I/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Hal : Undangan Seminar Proposal
A.n. Hisbullah/10800113186

Samata, 0 / Maret 2017

Kepada Yth:

1. Memen Suwandi, SE., M.Si. Sebagai Pembimbing I
2. Dr. Amiruddin K., M.EI. Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Maret 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Judul Skripsi : Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pemerintahan (Studi Kasus BAPPEDA Kabupaten Gowa)
Tempat : Ruang Seminar 101

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS

ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa . ■ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

JUDUL

Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pemerintahan (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Gowa)


Samata-Gowa, Juni 2017



Hisbullah
Nim: 10800113186

Pembimbing I

Pembimbing II


Memen Suwandi., SE., M. Si
NIP. 19720228 200912 1 003


Dr. Amiruddin K., M. EI
NIP. 19640908 199903 1 001

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan Akuntansi


Jamaluddin M. SE., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NIP: 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 1924 /EB.I/PP.00.9/2017
Lamp : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 00 Maret 2017

Kepada,

**Yth. Kantor UPT P2T BKPM
Sulawesi Selatan**

Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Hisbullah**
NIM : 10800113186
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Paccinongan Harapan

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya **"Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pemerintahan (Studi Kasus pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)"**

Dengan Dosen Pembimbing: 1. **Memen Suwandi, SE., M.Si.**
2. **Dr. Amiruddin K., M.El.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **BAPPEDA Kabupaten Gowa**.
Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Jalan Tamanurung No. 04 Tlp. (0411) 889055, Sungguminasa 92111

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Mursad, ST

Jabatan : Kepala Badan

Menerangkan bahwa Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas UIN Alauddin Makassar yang Bernama:

Nama : Hisbullah

NIM : 10800113186

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gowa dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pemerintahan.**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Gowa, 09 Juni 2017

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
MAKASSAR





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : *4501* /EB.1/PP.00.9/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Seminar Hasil

Samata, *07* Agustus 2017

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Hisbullah
NIM : 10800113186
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Aktual dalam Meningkatkan Kualitas kerja pemerintah (Studi kasus Bappeda Kabupaten Gowa)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Agustus 2017
Waktu : 09.00 - 16.00 WITA
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Dekan
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 475/EB.1/PP.00.9/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Samata, 22 Agustus 2017

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Hisbullah
NIM : 10800113186
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : "Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (studi Kasus BAPPEDA Kabupaten Gowa)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2017
Waktu : 13.00-15.00 Wita
Tempat : L. 206

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



HISBULLAH, Di lahirkan di Kabupaten Sinjai tepatnya di Dusun Biroro Desa Biroro kecamatan Sinjai Timur pada tanggal 28 juni 1994. Penulis merupakan anak kesembilan dari sembilan bersaudara, buah hati dari Ayahanda Made ali dan

Ibunda Bale. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 34 Biroro hingga tamat pada Tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Panaikang hingga tamat pada tahun 2009 kemudian pada tahun tersebut melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sinjai Utara hingga Tamat pada Tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan Menyelesaikan Studi pada tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R